



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

NOTULA

- Rapat : **Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025**
- Hari/Tanggal** : Rabu, 5 November 2025
- Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
- Tempat : **Balai Keratun Lantai III Pemerintah Provinsi Lampung
Jl. Dr. Wolter Mongonsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung**
- Acara : 1. Sambutan oleh Gubernur Lampung
2. Paparan oleh Ketua KPK-RI
3. Pembahasan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Provinsi Lampung
4. Kesimpulan
- Moderator** : **Drs.Sahat Paulus Naipoospos.MM Fungsional PPUPD Madya
Irbanwil V Inspektorat Provinsi Lampung.**
- Undangan : 1. Gubernur dan Bupati /Walikota se-Lampung
2. Kapoda Lampung dan Jajaran
3. Kejati Lampung dan jajarannya
4. Kepala Pengadilan Negeri Lampung
5 Kepala Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Lampung
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung
7. Inspektur Provinsi Lampung dan jajarannya
8. Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Jajaran
9. Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
10 Kejari dan Kapolres Kabupaten/kota se-lampung
- Panitia : **Inspektorat Provinsi Lampung dan Karo Administrasi
Pimpinanan serta Karo Umum Setdaprov.Lampung.**
- Sambutan Gubernur Lampung** : Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan MCSP KPK-RI tahun 2025 mendapatkan nilai diatas rata-rata nasional dan penguatan integritas di seluruh perangkat daerah. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mengedepankan upaya deteksi dini terhadap potensi korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi dan Survey Penilaian Integritas yang sudah baik di Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung

melalui Inspektorat Provinsi Lampung telah menyediakan sarana pengaduan Tindak pidana korupsi melalui aplikasi Whistleblowing System (WBS). Gubernur Lampung berharap kepada ASN dan pegawai untuk melaporkan dugaan penyimpangan KKN dan Gratifikasi di Pemerintah Provinsi Lampung melalui aplikasi yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menegakkan integritas pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan menanda tangani fakta integritas atas jabatan tersebut.

Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Lampung telah menandatangani Komitmen anti korupsi yang dilaksanakan oleh KPK-RI di kantor pusat Jakarta.

Integritas menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik. tanpa integritas kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat karena itu pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas Utama

Pemerintah Provinsi Lampung menjadi motor dalam memperkuat kolaborasi sebagai sektor untuk membangun kepercayaan publik.

Ketua KPK-RI : Tugas Koordinasi KPK Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2019 adalah melakukan Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas dan melaksanakan pelayanan publik.

- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait
- Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai

upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Area Intervensi dan Kerawanan Korupsi yang dilakukan oleh KPK-RI pada Pemda yakni :

- Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelayanan Publik
- Manajemen ASN
- Optimalisasi Pajak
- Pengawasan APIP
- Pengelolaan BMD

Capaian MCSP KPK-RI Tahun 2025 per 4 November 2025

mendapat Nilai 80 peringkat 6 tingkat nasional dengan predikat tinggi dan survey Penilaian Integritas mendapatkan indeks nasional dengan 71,53 di tahun 2024 dan di tahun 2025 dalam proses penilaian.

**Kepala BPKP
Perwakilan
Lampung
Agus
Setiawan**

Pengendalian risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah harus memenuhi prinsip value for money yakni memastikan barang dan jasa yang diadakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menekankan mitigasi risiko sejak awal serta kelengkapan administrasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya korupsi.

Potret PBJ :

Rata-rata alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah SeProvinsi Lampung sebesar 12,76% dari total Alokasi Belanja Rendahnya realisasi Penyelesaian pada PBJ Provinsi Lampung :

- Lemahnya fungsi pengawasan lapangan
- Tidak optimalnya fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Risiko fraud pada tahapan PBJ adalah

- Pengadaan tidak didasari Dokumen Perencanaan, misal tidak terdapat dalam RPJMP/D, Renstra, Renja, KUA/PPAS.
- Pengadaan tanpa justifikasi identifikasi kebutuhan dan tidak didukung proses perencanaan yang sistematis;

- Kesalahan penentuan jenis pengadaan;
- Intervensi negatif dalam penganggaran pengadaan;
- Penganggaran tanpa perhitungan kebutuhan yang tepat atau kebutuhan biaya pengadaan tidak komprehensif;
- Perencanaan terkait waktu pelaksanaan yang tidak realistis;
- Spesifikasi teknis tidak disusun pada tahap perencanaan;
- Pemecahan paket untuk menghindari lelang;
- Pengangkatan pelaku pengadaan tidak memenuhi persyaratan.

**Kasatgas
Penindakan
KPK-RI
Kuswanto**

Perkara pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu isu yang menjadi prioritas penegak hukum, sebagian besar proyek kasus berawal dari proyek yang tidak selesai, lemahnya administrasi sejak tahap perencanaan dan penganggaran.

Perkara penyelewengan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terjadi karena lemahnya administrasi dan penyimpangan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa dan KPK-RI melakukan penindakan paling tinggi adalah sektor Pengadaan barang dan jasa.

- Kesimpulan :**
- Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperkuat sinergi kerjasama lintas sektor dengan pengawasan eksternal (BPKP Perwakilan Lampung) dalam pencegahan korupsi di sektor PBJ
 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pencegahan korupsi sejak dini

NOTULIS,



AHMAD ROZI SUBING,SH.MM

RAPAT KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025



